

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada Kecamatan Nanggalo, terdapat 3 tingkat kerawanan banjir antara lain tingkat kerawanan banjir tinggi (Sangat Rawan), sedang (Rawan), dan rendah (Tidak Rawan). Tingkat kerawanan banjir yang mendominasi pada Kecamatan Nanggalo ialah tingkat kerawanan banjir tinggi (Sangat Rawan) dengan persentase 82% luas wilayah dengan luasan 775,68 Ha, untuk sedang (Rawan) 10% luas wilayah dengan luasan 94,06 Ha, dan rendah (Tidak Rawan) sebesar 9% luas wilayah dengan luasan 81,36 Ha.

Upaya mitigasi bencana banjir secara fisik berupa pembangunan serta pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase, membangun rumah berteras tinggi dan berlantai 2, membuat kanal dan tanggul pada sungai, membuat kolam retensi, lubang biopori/sumur resapan. Sedangkan untuk mitigasi bencana banjir non fisik berupa pemetaan lokasi kerawanan banjir untuk diinformasikan kepada masyarakat, penyuluhan mengenai bahaya banjir, dan langkah yang perlu dilakukan ketika banjir terjadi, pelatihan secara langsung dilapangan ketika menghadapi bencana banjir, membersihkan sedimen drainase, membuat kelompok sadar bencana dan komunitas peduli sungai, serta pemasangan rambu-rambu ataupun papan peringatan daerah rawan banjir dan pengongan zona terlarang berupa daerah sempadan sungai.

Pada analisis tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Nanggalo yang dioverlay (disatukan) dengan penggunaan lahan, pada tingkat kerawanan banjir tinggi dan sedang jenis penggunaan lahan yang paling besar luasannya berada pada tingkat kerawanan banjir tersebut adalah jenis penggunaan lahan perumahan. Pada tingkat kerawanan banjir sedang, jenis penggunaan lahan perumahan berada didalam zonma bencana banjir sedang dengan persentase 54,14% atau seluas 417,22 Ha, dan untuk tinggi sebesar 35,72% atau seluas 29,27 Ha luas wilayah. Pada analisis arahan pengendalian ruang (Penggunaan Lahan) eksisting, untuk permukiman dikendalikan dengan penambahan vegetasi seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman kota ditengah permukiman. Diarahkan dengan membangun kolam retensi, sumur resapan, lubang biopori sebagaiu upaya fisik guna membantu dalam menampung dan menyerap air hujan dan luapan sungai. Untuk pengendalian pemanfaatan ruang bagian perizinan, boleh membangun rumah di zona tingkat kerawanan banjir sedang dan tinggi dengan membangun rumah dengan design 2 lantai, dan juga tidak memberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

pada yang akan membangun rumah di daerah sempadan sungai. Kemudian untuk rumah swadaya yang berada di zona kerawanan banjir tinggi di dekat daerah sungai harus menanam tanaman/pepohonan penyerap air guna menyerap air hujan dan luapan sungai. Bagian insentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah peningkatan infrastruktur seperti prasarana drainase untuk ditingkatkan, dan pemeliharaan kondisi drainase di Kecamatan Nanggalo.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah seharusnya lebih memperhatikan keadaan dan kondisi drainase, bahwa sebenarnya pembangunan prasarana drainase belum seluruh wilayah terfasilitasi. Sehingga daerah yang belum ada drainase akan susah ketika menghadapi musim penghujan dan luapan air sungai yang menyebabkan genangan hingga banjir terjadi. Kondisi dan keberadaan drainase yang baik, akan mampu menghadapi bencana banjir karena akan mudah mengaliri air hujan dan luapan sungai hal ini sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana banjir.
2. Diharapkan kepada pemerintah harusnya lebih memperhatikan dengan seksama setiap masyarakat yang akan membangun rumah di sekitaran sungai, agar tidak diberikan izin membangun bangunan (IMB) karena akan membahayakan masyarakat itu sendiri apabila membangun rumah di dekat daerah aliran sungai atau sempadan sungai.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk ada memberikan sebuah pelatihan ataupun sosialisasi mengenai Bahaya Bencana Banjir kepada masyarakat setidaknya 1x dalam setahun, agar masyarakat terdidik dan mengetahui apa saja yang menyebabkan bencana banjir dan bagaimana cara mengatasi, menghadapi, dan meminimalisir bencana banjir tersebut akan terjadi kedepannya.
4. Setelah mengetahui zonasi tingkat kerawanan banjir, diharapkan pemerintah membuat sebuah kebijakan mengenai desain khusus membangun rumah di daerah rawan bencana. Agar ketika masyarakat akan membangun rumah, mereka sudah membangun sesuai dengan aturan membangun di kawasan rawan bencana dan aman dari bencana tersebut.
5. Diharapkan kepada masyarakat lebih kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar, turut membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan dan turut andil dalam melakukan upaya mitigasi bencana banjir seperti gotong royong membersihkan sedimentasi drainase dan menjaga kebersihan sungai dari sampah.